

NANCY ONIBALA S.AP.,MPA
JEANE MANTIRI S.AB.,MAP
RECKY SENDOUW SP.,MM.,PH.D



Buku Ajar

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

BUKU AJAR ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Nancy Onibala S.AP.,MPA
Jeane Mantiri S.AB.,MAP
Recky Sendouw SP.,MM.,Ph.D



TAHTA MEDIA GROUP

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BUKU AJAR ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Penulis:

Nancy Onibala S.AP.,MPA
Jeane Mantiri S.AB.,MAP
Recky Sendouw SP.,MM.,Ph.D

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

viii,109, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-204-5

Cetakan Pertama:

November 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat kasih dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyusun buku ajar Mata kuliah Analisis Kebijakan Publik. Mata kuliah Analisis Kebijakan Publik ini ialah mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa di Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Mata kuliah Analisis kebijakan merupakan salah satu mata kuliah yang ada pada kelompok Mata kuliah Keahlian berkarya (MKK). Mata kuliah Analisis kebijakan dikuliahkan setiap semester Genap pada mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara FISH UNIMA. Melalui mata kuliah Analisis Kebijakan publik ini setiap mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang Pengertian dan ruang lingkup Analisis Kebijakan, Mampu menguraikan secara tepat tentang proses Analisis kebijakan, Mampu melakukan pengamatan lingkungan umum, lingkungan internal dan eksternal organisasi; Mampu menguraikan secara tepat model analisis William Dunn dalam rangka menganalisis suatu kebijakan; Mampu menguraikan secara tepat metode-metode untuk analisis kebijakan; Mampu menguraikan pentingnya peramalan masa depan kebijakan; Mampu memberikan rekomendasi kebijakan; Mampu melakukan pemantauan hasil kebijakan.

Buku ajar Analisis kebijakan yang telah disusun secara sistimatis sangat bermanfaat untuk mahasiswa dalam memahami tujuan-tujuan yang harus dicapai pada setiap kajian pokok bahasan. Di samping itu juga dapat memberikan petunjuk yang terarah tentang kompetensi yang harus dicapai dan ruang lingkup materi pembelajaran yang perlu untuk dipelajari. Dengan tersedianya buku ajar Analisis kebijakan maka akan membantu mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan, selanjutnya dosen akan lebih mudah menilai dan menerapkan standar penilaian berdasarkan tingkat penguasaan materi dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Satu hal yang pasti bahwa dalam tulisan ini terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran dan kritik sangat diharapkan dari pembaca guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga buku ajar ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Tondano, Oktober 2023

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I KONSEP DASAR ANALISIS KEBIJAKAN	1
A. Pendahuluan	1
B. Penyajian	1
C. Penutup.....	9
Latihan Soal.....	10
BAB II ANALISIS PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN	11
A. Pendahuluan	11
B. Penyajian	11
C. Penutup.....	24
Latihan soal	25
BAB III ANALISIS KEBIJAKAN WILLIAM DUNN	26
A. Pendahuluan	26
B. Penyajian	26
C. Penutup.....	33
Latihan soal!	33
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN WEIMER VINING.....	34
A. Pendahuluan	34
B. Penyajian	34
C. Penutup.....	42
Latihan Soal!	43
BAB V ANALISIS KEBIJAKAN PATTON-SAVICKY	44
A. Pendahuluan	44
B. Penyajian	44
C. Penutup.....	67
Latihan soal!	68
BAB VI ANALISIS KEBIJAKAN DELIBERATIF	69
A. Pendahuluan	69
B. Penyajian	69
C. Penutup.....	71
Latihan soal!	72

BAB VII POLICY PAPER	73
A. Pendahuluan	73
B. Penyajian	73
C. Penutup	79
Latihan soal!	80
BAB VIII ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DAN PENERAPANNYA .	81
A. Pendahuluan	81
B. Penyajian	81
C. Penutup	106
Latihan soal!	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
TENTANG PENULIS.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 28

Tabel 4.1 38

Tabel 4.2 39

Tabel 4.3 40

Tabel 5.1 59

Tabel 5.2 61

Tabel 8.1 101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	35
Gambar 4.2	37
Gambar 4.3	38
Gambar 5.1	45
Gambar 5.2	47

KONSEP DASAR ANALISIS KEBIJAKAN

A. PENDAHULUAN

Kebijakan selalu menjadi polemik yang tak pernah berhenti dipermasalahkan baik itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak dunia usaha, instansi atau organisasi profit maupun non profit masyarakat pada umumnya. Selalu aktif membahas kebijakan baik kebijakan ke dalam organisasi maupun kebijakan keluar organisasi. Sehingga sebelum membahas lebih jauh tentang analisis kebijakan publik, sangat diperlukan untuk terlebih dahulu memahami konsep kebijakan. Hal ini perlu dilakukan karena begitu luasnya penggunaan konsep dan istilah kebijakan, sehingga akan menimbulkan sudut pandang yang berbeda dalam memahami konsep kebijakan. Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani “polis” berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “politia” yang berarti negara. Kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa Inggris “policie” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kemudian kebijakan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Sedangkan kata publik (public) sendiri sebagian mengartikan negara. Misalnya saja Islami (2007) dan Wahab (2008) tetap mempertahankan istilah negara ketika menerjemahkan kata publik.

B. PENYAJIAN**1. Pengertian Analisis Kebijakan Publik**

William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Weimer and Vining, (1998:1): The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision. Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi

publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan. Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.

Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas. Dunn (2000: 117) membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik, yaitu;

1. Analisis Kebijakan Prospektif Analisis; Kebijakan Prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan suatu alat untuk mensintesis informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.
2. Analisis Kebijakan Retrospektif; Analisis kebijakan retrospektif adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analisis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analisis ini yakni analisis yang berorientasi pada disiplin, analisis yang berorientasi pada masalah dan analisis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan.
3. Analisis Kebijakan yang Terintegrasi; Analisis kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analisis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan

retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.

Beberapa konsep analisis kebijakan publik:

- a. Disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan multi-metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang policy relevant buat memecahkan masalah kebijakan (W.N. Dunn).
- b. Proses mengevaluasi beberapa alternatif kebijakan dengan menggunakan kriteriakriteria yang relevan agar diperoleh alternatif terbaik untuk dijadikan tindakan kebijakan (D.L. Weimer dan A.R. Vining)
- c. Cara untuk mensintesa informasi, termasuk hasil penelitian, untuk menghasilkan format keputusan kebijakan (penentuan pilihan-pilihan alternatif) dan untuk menentukan kebutuhan masa depan akan informasi yang policy relevant (Walter Williams, 1971)
- d. Wildasky: Policy analysis is an activity creating problems that can be solved. (Analisis kebijakan adalah sebuah aktivitas menciptakan masalah yang dapat dipecahkan).
- e. Dunn: The process of producing knowledge of and in policy process. (Proses memproduksi ilmu pengetahuan tentang proses kebijakan dan pengetahuan dalam proses kebijakan).
- f. Leslie A. Pal: Policy analysis will be defined as the disciplined application of intellect to public problems. (Analisis kebijakan didefinisikan sebagai penerapan disiplin ilmu dari kaum intelektual pada masalah-masalah publik).

Dari beberapa pengertian di atas, dikemukakan beberapa ciri analisis kebijakan:

- a. Analisis kebijakan sebagai aktivitas kognitif (cognitive activity), yakni aktivitas yang berkaitan dengan learning and thinking. Aktivitas tersebut hanya sebagai salah satu aspek dari proses kebijakan (policy process), artinya masalah kebijakan didefinisikan, ditetapkan, dipecahkan, dan ditinjau kembali. Proses tersebut akan melibatkan berbagai pihak, baik pihak yang setuju maupun yang tidak, baik mereka sebagai pemilih maupun sebagai yang dipilih. Selain itu, juga melibatkan kelompok kepentingan dan legislator, birokrat dan media massa. Elemen kognitif memiliki peran sentral dalam proses tersebut, sekalipun tidak dominant. Dikatakan memiliki peran sentral, karena menurut Leslie A. Pal bahwa proses kebijakan sesungguhnya, hanyalah merupakan proses diskusi dan

debat (discussing and debating) ide-ide mereka tentang prioritas, masalah, dan solusinya. Aspek kognitif yakni memikirkan tentang posisi seseorang pada masalah kebijakan tertentu yang dilakukan oleh semua orang yang terlibat sejauh mereka dibutuhkan dalam klarifikasi atau justifikasi dan rasionalisasi pandangan atau pendapat mereka. Sungguhpun demikian, analisis kebijakan yang baik dan argumentasi kebijakan yang jelas dan meyakinkan tidak pernah dilakukan. Hal tersebut disebabkan jarang sekali bisa sampai pada kesimpulan, sekalipun hal tersebut menjadi lebih penting, karena proses kebijakan sebagai proses politik yang berusaha memadukan kekuasaan dan kepentingan.

- b. Analisis kebijakan sebagai bagian dari proses kebijakan secara kolektif sehingga merupakan hasil aktivitas kolektif. Misalnya seorang menteri meminta kepada penasehatnya untuk melakukan analisis dan melaporkan tentang suatu isu kebijakan. Laporan penasehat tadi tidak akan menjadi dasar keputusan mereka. Hal tersebut disebabkan karena masalah kebijakan publik sesungguhnya adalah publik itu sendiri. Mereka akan menghasilkan arus informasi hasil analisis dari berbagai sumber, seperti dari laporan surat kabar, representasi kelompok kepentingan, buku dan artikel ilmiah, komite parlementaria dan sebagainya. Jika demikian, ketika analisis dilakukan secara individual, pembuatan kebijakan biasanya dibuat didasarkan pada pengetahuan kolektif dan terorganisasi terhadap masalah-masalah kebijakan. Setiap analisis profesional harus memahami fakta tersebut dan implikasinya.
- c. Analisis kebijakan sebagai disiplin intelektual terapan. Hal ini berarti masalah kebijakan yang harus dikaji melalui aktivitas dari sejumlah analisis. Analisis kebijakan adalah reflektif, kreatif, imajinatif, dan eksploratori sekaligus sebagai kontrol diri pada tataran terbaik. Analisis kebijakan tidak akan pernah membuang semua asumsi dan beberapa latar yang diperlukan untuk tetap memperkuat hasil analisis. Namun demikian, analisis individual membutuhkannya bukan untuk memperlemah masalah tersebut dan apa yang telah tersedia menunjukkan bahwa analisis kebijakan sebagai bagian yang terorganisasi. Asumsi-asumsi dan bias setiap studi tunggal (single study) akan diungkap dan diteliti secara cermat atau seksama oleh orang lain dalam proses kebijakan. Tanggung jawab setiap analisis sekedar "memperjelas" dan merefleksikan diri sebaik mungkin untuk membantu meningkatkan kejelasan, namun tidak mengamati sampai pada sasarannya.

- d. Analisis kebijakan berkaitan dengan masalah-masalah publik (public problems). Tidak semua masalah masuk ranah publik bahkan ketika masalah tersebut melibatkan sejumlah besar orang. Masalah publik memiliki dampak pada masyarakat atau beberapa orang berkepentingan sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan manakala memperdebatkan kebijakan yang berkaitan dengan apakah masalah-masalah tersebut merupakan masalah publik dalam pengertian ini dan dalam hal ini menjadi target dari aksi kebijakan (policy action). Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas. Analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

Kebijakan publik merupakan pondasi untuk melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang lainnya mengingat secara hakiki upaya pembangunan adalah untuk membangun potensi manusianya yang kelak akan menjadi pelaku pembangunan di berbagai bidang pembangunan lainnya. Filosofis dalam kebijakan pendidikan pada dasarnya dijiwai oleh cita-cita luhur sebagaimana rumusan yang termaktub dalam amanat konstitusi. Dalam konteks inilah filosofis tersebut harus dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan setiap kebijakan publik. Untuk itulah kebijakan yang berpihak sangat diperlukan dari semua pihak, terutama pemerintah khususnya menyangkut dana atau anggaran.

2. Analisis Kebijakan

Bernadus Luankali dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan mengungkapkan bahwa analisis didefinisikan sebagai “penyerapan, pengkajian serta penggunaan informasi guna membuat kesimpulan”. (Luankali, 2007:114). Hal ini

berarti bahwa dalam menganalisis peneliti melakukan kajian terhadap suatu objek riset dengan terlebih dahulu memecahnya ke dalam beberapa bagian, kemudian dilakukan pengujian atas bagian-bagian itu. Menurut Dale Yoder seperti yang dikutip oleh A. A. Anwar Prabu Mangkunegara dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, analisis didefinisikan sebagai “Prosedur melalui fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap pengamatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis” (dalam Mangkunegara, 2001:13). Berdasarkan pendapat di atas, kegiatan analisis merupakan proses kerja dari rentetan tahapan pekerjaan sebelum riset didokumentasikan melalui tahapan penulisan laporan. Analisis dapat dilihat dari berbagai perspektif. Halim dalam bukunya Analisis Investasi menjelaskan analisis dapat dilihat dari:

1. **Secara mekanis, dalam tahapan analisis akan terjadi:**
 - a. Perubahan angka dan catatan hasil pengumpulan data jadi informasi yang lebih mudah dipahami
 - b. Penggunaan alat analisis yang bermanfaat untuk membuktikan hipotesis ataupun pendeskripsian variabel riset secara benar, bukan kebetulan saja.
 - c. Penginterpretasian berbagai informasi dalam kerangka yang lebih luas, atau inferensi ke populasi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul.
2. **Secara substantif, dalam tahapan analisis dilakukan proses:**
 - a. Membandingkan dan mengetes teori atau konsep dengan informasi yang ditemukan.
 - b. Mencari dan menentukan konsep baru dari data yang dikumpulkan.
 - d. Mencari penjelasan apakah konsep baru itu berlaku umum, atau baru terjadi bila ada kondisi tertentu (Halim, 2002: 35). Perspektif analisis baik dilihat secara mekanis atau substantif akan lebih memudahkan dalam menganalisis. Perspektif analisis juga dapat menentukan dari sisi mana kita akan menganalisis. Secara substantif dalam pembuatan kebijakan SIM Lingkungan, BPLH dan Bappsi menggunakan perspektif tersebut.
3. **Macam-macam analisis** Analisis merupakan aktivitas untuk menciptakan pengetahuan. Analisis diperlukan untuk mengetahui kekurangan apa saja yang dihadapi dalam suatu aktivitas. Menurut Halim dalam bukunya Analisis Investasi, menguraikan bahwa analisis dapat dilihat sesuai dengan kegunaannya yaitu:

- a. Analisis teknikal adalah analisis yang dimulai dengan cara memperhatikan instansi itu sendiri dari waktu ke waktu.
 - b. Analisis kekuatan relatif (Relative strength analysis) adalah analisis yang berupaya mengidentifikasi masalah yang memiliki kekuatan relative terhadap masalah lain.
 - c. Analisis fundamental adalah suatu sekuritas memiliki nilai intrinsik tertentu (nilai tingkah lakunya). Nilai intrinsik suatu sekuritas ditentukan oleh faktor-faktor fundamental yang mempengaruhinya. Faktor tersebut dapat dari instansi. Analisis ini akan membandingkan nilai intrinsik suatu sekuritas dengan tingkah laku pegawai guna menentukan apakah sudah dapat diterapkan atau belum. Analisis ini akan memahami dan akhirnya mengevaluasi kinerja pegawai yang diterapkan.
 - d. Analisis instansi individual adalah analisis yang dilakukan dengan mengamati kinerja fungsi-fungsi instansi dan kepemimpinan para pegawai. Analisis ini akan mengetahui perkembangan dan kondisi kinerja pegawai (Halim, 2002: 40). Berdasarkan kegunaan analisis di atas, maka kita dapat mengetahui apakah tujuan analisis tersebut. Kegunaan analisis di atas merupakan tolak ukur dalam pembuatan kebijakan SIM Lingkungan di BPLH dan Bapapsi Kabupaten Bandung. Adapun analisis teknikal dan analisis instansi individual menjadi gambaran BPLH dan Bapapsi dalam pembuatan kebijakan SIM lingkungan itu sendiri.
4. **Analisis kebijakan** Dunn mengemukakan pengertian analisis kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya analisis kebijakan adalah "suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik". (Dunn, 2003:43). Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan oleh pendapat para ahli di atas, maka analisis kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dunn mengatakan keberhasilan analisis pembuatan kebijakan dapat dikembangkan melalui tiga proses, yaitu:
- a. Proses pengkajian kebijakan, menyajikan metodologi untuk analisis kebijakan. Metodologi di sini adalah sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.
 - b. Proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu:

penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Proses komunikasi kebijakan, merupakan upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Dalam hal ini sebagai penciptaan dan penilaian kritis, pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. (Dunn, 2003:1). Analisis kebijakan merupakan suatu proses kognitif, sementara pembuatan kebijakan bersifat politis. Keberadaan analisis kebijakan disebabkan banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Kebijakan dianggap tidak memecahkan masalah, bahkan menciptakan masalah baru. Analisis kebijakan, diperlukan untuk mengetahui kebijakan apa yang cocok dalam proses pembuatan kebijakan. Kebijakan tersebut dibuat sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Analisis dapat dikembangkan di awal pembuatan suatu kebijakan ataupun di akhir penerapan kebijakan.

Analisis kebijakan menurut Budi Winarno “berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab akibat dan konsekuensi - konsekuensi kebijakan”. (Winarno, 2005:27). Analisis kebijakan adalah bentuk penelitian terapan yang dijadikan untuk mencapai tingkat pengetahuan yang lebih mendalam tentang issue-isue teknik sosial yang membawakan solusi-solusi yang lebih baik. Definisi analisis kebijakan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan merupakan suatu pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian atau penyelidikan sebuah sebab akibat dari suatu kebijakan yang mampu memberikan jalan keluar dari berbagai macam alternatif program serta kinerja kebijakan. Analisis kebijakan dapat menganalisis pembentukan, substansi dan dampak dari kebijakan-kebijakan tertentu. Analisis kebijakan dilakukan tanpa mempunyai kecenderungan untuk menyetujui atau menolak kebijakan-kebijakan. Pada dasarnya terdapat tiga hal pokok dalam menganalisis kebijakan yaitu:

- 1) Fokus utama adalah mengenai penjelasan / anjuran kebijakan yang pantas
- 2) Sebab-sebab dan konsekuensi dari kebijakan diselidiki dengan menggunakan metodologi ilmiah.
- 3) Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teoriteori umum yang dapat diandalkan kebijakan-kebijakan dan pembentukannya. Sehingga dapat diterapkan kepada lembaga dan bidang kebijakan yang berbeda. (dalam Tangkilisan, 2003:3). Berdasarkan pemaparan di atas analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi

masalah-masalah politik sosial sekarang ini.

3. Ciri-ciri Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan memiliki beberapa ciri, seperti yang dikemukakan oleh Joko Widodo dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, bahwa ciri-ciri dari analisis kebijakan sebagai berikut:

- 1) Analisis kebijakan sebagai aktivitas kognitif (cognitive activity)
- 2) Analisis kebijakan sebagai bagian dari proses kebijakan secara kolektif sehingga merupakan hasil aktivitas kolektif.
- 3) Analisis kebijakan sebagai disiplin intelektual terapan.
- 4) Analisis kebijakan berkaitan dengan masalah-masalah publik (Widodo, 2007: 20-22) Adapun penjelasan dari ciri-ciri analisis kebijakan di atas sebagai berikut:

Pertama, Analisis kebijakan sebagai aktivitas kognitif (cognitive activity), yaitu aktivitas yang berkaitan dengan learning and thinkity. Aktivitas tersebut hanya sebagai salah satu aspek dari proses kebijakan (policy process), artinya masalah kebijakan didefinisikan, ditetapkan, dipecahkan, dan ditinjau kembali. Proses tersebut akan melibatkan berbagai pihak, baik pihak yang setuju maupun yang tidak, baik mereka sebagai pemilih maupun yang dipilih.

Kedua, Analisis kebijakan sebagai bagian dari proses kebijakan secara kolektif sehingga merupakan hasil aktivitas kolektif. Analisis pada tataran awal hanya bisa dilakukan secara individual. Analisis lebih tepat dipahami sebagai kontribusi yang terorganisasi sekaligus sebagai pengetahuan kolektif terhadap masalah kebijakan tertentu.

Ketiga, analisis kebijakan sebagai disiplin intelektual terapan. Masalah kebijakan harus dikaji melalui aktivitas dari sejumlah analisis. Aplikasi sederhana berkaitan dengan kebijaksanaan konvensional sekalipun dalam pengertian ini bukan sebagai disiplin.

Keempat, analisis kebijakan berkaitan dengan masalah-masalah publik, tidak semua masalah masuk ranah publik bahkan ketika masalah tersebut melibatkan sejumlah orang, masalah publik memiliki dampak pada masyarakat atau beberapa orang yang berkepentingan sebagai anggota masyarakat.

C. PENUTUP

William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di

tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Weimer and Vining, (1998:1): The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision. Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan. Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik.

LATIHAN SOAL

1. Sebutkan pengertian analisis kebijakan publik!
2. Sebutkan dan jelaskan tahapan analisis kebijakan publik!
3. Sebutkan dan jelaskan macam-macam analisis kebijakan publik!
4. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri analisis kebijakan publik!

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Bandung : Pustaka Setia
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Budiardjo, Miriam. 1978. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Dunn, William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta : Gaya Media
- Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik (Proses, Analisis, dan Partisipasi).Bogor. Ghalia Indonesia
- Islamy, M. Irfan. 1992. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara
- Pasolong, Harbani. 2013. Teori Administrasi Publik. Bandung: ALFABETA
- Parsons, Wayne. Public Policy (Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan):Kencana
- Suharto, Edi. Analisis Kebijakan Publik. Bandung. PT. Alfabeta.
- Sudarmawan Danim, 2005, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan Publik, Jakarta: Bumi Aksara.
- Dr. Suharno, M. Si. 2013. Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodrs. 2011. Politik Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Weimer, DL. and Vining, Aidan R. (1998). *Policy Analysis Concepts and Practice*. New Jersey: Prentice Hall.

TENTANG PENULIS



Nancy Melisa Onibala, S.AP., MPA, lahir di Manado 14 Oktober 1992. Penulis merupakan lulusan S1 Universitas Samratulangi Manado Tahun 2014, S2 Universitas Gadjah Mada tahun 2016. Saat ini aktif sebagai Dosen Universitas Negeri Manado



Jeane Mantiri, SAB., MAP, lahir di Manado 19 Juli 1983. Penulis merupakan lulusan S1 Universitas Samratulangi Manado Tahun 2005, S2 Universitas Negeri Manado tahun 2014. Saat ini penulis aktif sebagai Dosen Universitas Negeri Manado sejak tahun 2015



Recky H.E. Sendouw, SP., MM., Ph.D, lahir di Manadi 28 April 1972. Lulus S1 tahun 1995 dan S2 tahun 2003 dari Institut Pertanian Bogor. Kemudian, melanjutkan studi di Okayama University Japan lulus dengan gelar Ph.D tahun 2009. Saat ini penulis aktif sebagai dosen dan sejak tahun 2022 menjabat sebagai Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado

Buku Analisis Kebijakan ini disusun secara khusus sebagai bahan ajar mahasiswa, juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan umum. Dalam buku ini membahas tentang; konsep dasar analisis kebijakan, analisis proses pembuatan kebijakan, analisis kebijakan versi William Dunn, Weimer-Vinning, Patton-Savicky, analisis kebijakan deliberatif, proses pembuatan policy paper, serta analisis kebijakan dan penerapannya.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamediaigroup
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISSN 978-623-147-204-5 (PDF)

